

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pengelolaan pendidikan modern, keberhasilan tersebut tidak lagi hanya bergantung pada peran sekolah dan pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai stakeholder pendidikan (Muttaqin & Nurwati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan dasar yang efektif dan berkelanjutan.

Paradigma pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran dari sistem yang bersifat sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini sejalan dengan tata kelola pendidikan modern yang menuntut kolaborasi antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal (Heriyadi et al., 2025). Dalam paradigma ini, sekolah diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis.

Secara konseptual, peran komite sekolah sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Komite sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai jembatan antara kepentingan sekolah dan masyarakat. Melalui perannya, komite sekolah diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat, memberikan masukan dalam perencanaan program, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pendidikan. Partisipasi aktif komite sekolah juga diyakini dapat memperkuat implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih demokratis dan partisipatif.

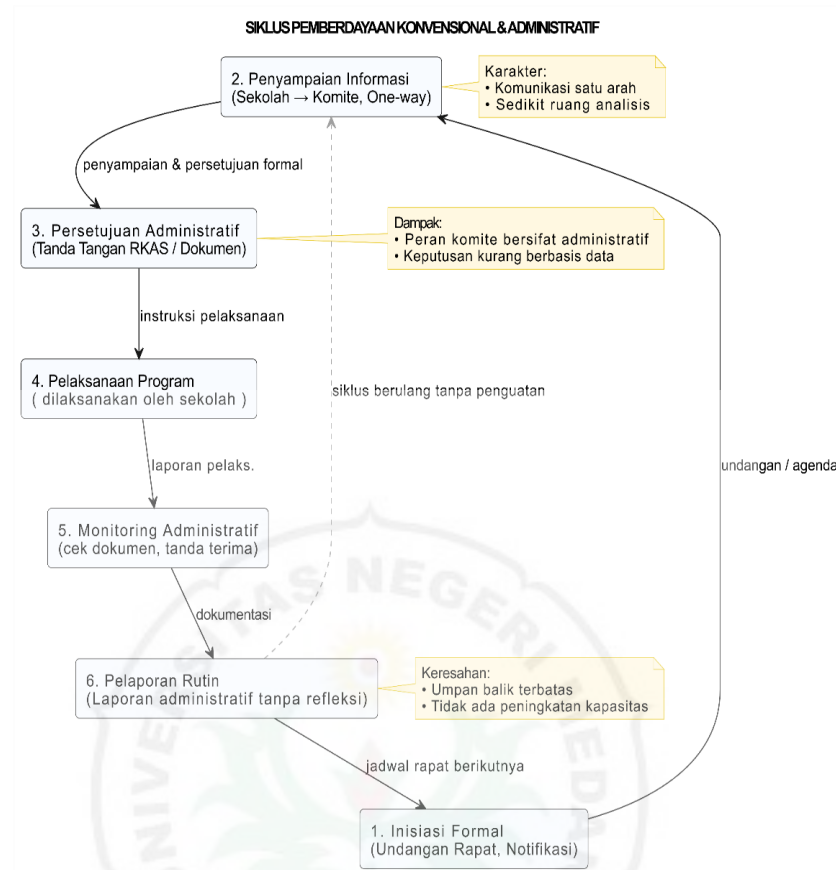
Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah masih belum optimal. Komite sekolah di Indonesia masih cenderung berfungsi secara administratif dan simbolik (Kosali et al., 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa komite sekolah sering kali hanya dilibatkan dalam kegiatan tertentu, seperti penggalangan dana atau persetujuan administratif, tanpa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang strategis (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif komite sekolah dengan praktik implementasinya di lapangan.

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya kapasitas dan pemahaman anggota komite terhadap tugas dan fungsinya menjadi kendala utama. Banyak anggota komite sekolah belum mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang memadai terkait manajemen pendidikan (Suryana, 2023). Sementara itu, secara eksternal, pola komunikasi antara sekolah dan komite masih cenderung bersifat satu arah (top-down), sehingga komite sekolah tidak memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut juga terjadi pada tingkat lokal, khususnya di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengamatan partisipasi masyarakat melalui

komite sekolah sebesar 60% pada kategori "adil". Artinya, pemahaman kepala sekolah tentang pentingnya peran komite sekolah perlu ditingkatkan (Ritonga et al., 2025). Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara awal, diperoleh bahwa tingkat partisipasi komite dalam penyelenggaraan pendidikan masih belum optimal. Para ketua komite menjelaskan bahwa selama ini peran mereka lebih banyak bersifat administratif, seperti menghadiri rapat, memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan, atau menandatangani dokumen sekolah, tanpa terlibat secara mendalam dalam proses perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi program pendidikan. Minimnya pemahaman komite terhadap regulasi pendidikan, khususnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, serta kurangnya pelatihan dan pembinaan dari sekolah maupun dinas pendidikan menjadi penghambat utama dalam menjalankan fungsi strategis mereka. Komunikasi antara sekolah dan komite masih juga belum berjalan intensif, sebagian ketua komite menyebutkan bahwa mereka hanya dihubungi ketika ada kegiatan tertentu, bukan sebagai mitra yang terlibat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan sekolah.

Pola pemberdayaan komite sekolah yang selama ini menurut wawancara dengan komite sekolah juga dilakukan bersifat konvensional dan belum berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Komite sekolah cenderung diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai mitra strategis. Tidak adanya sistem pembinaan yang berkelanjutan serta minimnya ruang partisipasi menyebabkan komite sekolah tidak mampu menjalankan perannya secara optimal. Dengan demikian siklus di atas, secara lengkap dijelaskan dengan gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Pola Pemberdayaan Faktual Komite Sekolah

(Sumber: wawancara komite sekolah)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat beberapa kesenjangan utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan peran, komite sekolah di Pantai Labu belum berfungsi optimal sebagai mitra strategis sekolah.
2. Kesenjangan kapasitas, anggota komite belum mendapatkan pelatihan dan pembinaan manajemen berbasis partisipasi masyarakat.
3. Kesenjangan kolaborasi, hubungan antara kepala sekolah, guru, dan komite belum sinergis, komunikasi masih bersifat top-down
4. Kesenjangan adaptivitas, belum ada model manajemen komite yang responsif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan lokal masyarakat sekolah dasar.

Dari perspektif teoritis, konsep pemberdayaan dalam manajemen pendidikan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif stakeholder dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dipertegas bahwa pendekatan manajemen adaptif menekankan fleksibilitas, kemampuan belajar organisasi, serta responsivitas terhadap perubahan lingkungan (Yulasteriyani et al., 2023). Dalam praktiknya, kedua konsep tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam pengelolaan komite sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dari sisi penelitian, sebagian besar studi tentang komite sekolah hanya bersifat deskriptif dan evaluatif, yang hanya menggambarkan tingkat partisipasi tanpa menawarkan solusi yang aplikatif. Belum banyak penelitian yang mengembangkan model pemberdayaan komite sekolah yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan dan mampu menjawab kebutuhan lokal secara adaptif. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang menunjukkan perlunya pengembangan model manajemen pemberdayaan yang lebih kontekstual, dinamis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara peran ideal komite sekolah sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya suatu pendekatan baru dalam pemberdayaan komite sekolah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan model manajemen pemberdayaan komite sekolah berbasis adaptif yang mampu meningkatkan

partisipasi secara substantif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dasar.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru (*novelty*) yang mampu menjawab kelemahan pola pemberdayaan konvensional melalui kerangka manajemen yang lebih adaptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Berbasis Siklus Adaptif yang memadukan empat fase dinamis (*growth, conservation, release, dan reorganization*) dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan di tingkat sekolah dasar. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kolaborasi, efektivitas serta partisipasi komite sekolah dasar secara berkelanjutan, khususnya di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang mengerucut pada penelitian ini adalah belum tersedianya model manajemen pemberdayaan komite sekolah berbasis adaptif yang mampu meningkatkan partisipatif secara substantif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pantai Labu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi komite sekolah sesuai fungsi komite sekolah pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
2. Rendahnya kapasitas manajerial dan pemahaman regulasi anggota Komite Sekolah.

3. Belum terbangunnya pola kolaborasi yang sinergis antara pihak sekolah dan Komite Sekolah.
4. Belum tersedianya model manajemen pemberdayaan Komite Sekolah yang berbasis adaptif dan kontekstual.
5. Belum adanya mekanisme siklus pemberdayaan yang sistematis, berkelanjutan, dan reflektif dalam meningkatkan partisipasi komite sekolah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan Model Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Berbasis Adaptif di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang difokuskan pada peningkatan partisipasi komite sekolah dalam menjalankan fungsi advisory, supporting, controlling, dan mediating sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Pengembangan model dibatasi pada aspek manajerial dan siklus pemberdayaan yang adaptif terhadap karakteristik sosial serta kebutuhan lokal sekolah dasar, dengan subjek penelitian meliputi komite sekolah dan pihak sekolah terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu?

2. Bagaimana kelayakan model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu?
3. Bagaimana efektivitas model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu.
2. Untuk menganalisis kelayakan model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu.
3. Untuk menganalisis efektivitas model manajemen pemberdayaan berbasis adaptif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah dasar negeri di kecamatan Pantai Labu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam hal pemberdayaan Komite Sekolah sebagai mitra strategis untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah.

- b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait model manajemen kolaboratif antara sekolah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kepala Sekolah: Memberikan rekomendasi strategis bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam meningkatkan sinergi dengan Komite Sekolah.
- b. Bagi Komite Sekolah: Menyediakan panduan dalam menjalankan fungsi advokasi, kontrol, dan dukungan secara lebih optimal serta kontekstual.
- c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman akan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program sekolah.
- d. Bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kebijakan: Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi terhadap peran Komite Sekolah secara berkelanjutan.